

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada umumnya bertujuan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Pembangunan ekonomi Indonesia tidak lepas dari perannya dalam percepatan pembangunan antar daerah. Pembangunan ekonomi adalah proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat dari waktu ke waktu, selama jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak bertambah dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang itulah definisi pembangunan ekonomi menurut Meier (1995) dalam Hasan & Muhammad, (2018).

Pembangunan ekonomi memiliki kaitan erat terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pembangunan ekonomi suatu wilayah akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan di wilayah tersebut secara otomatis. (Umiyati, 2014). Konsep pembangunan yang dikenal dengan teori kutub pertumbuhan (*Growth Poles Theory*) telah dijelaskan oleh Perroux, (1950) bahwa pembangunan ekonomi tidak terjadi karena proses pembangunan secara serentak, tetapi di mulai dari wilayah atau kawasan tertentu yang dinamakan pusat pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi jika diarahkan pada daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah yang bagus dengan pusat pertumbuhan wilayah yang baik maka akan memberikan efek limpahan (*spillover effect*) terhadap wilayah belakangnya (*hinterland*) sehingga wilayah tersebut juga mengalami perkembangan (Qibti & Hendarto, 2020) akan tetapi selain memberikan efek penyebaran sumber daya (*spread effect*) juga dapat menyebabkan efek negatif

berupa eksploitasi sumber daya di wilayah sekitarnya (*backwash effect*) (Capello, 2009).

Kesenjangan antar wilayah akan timbul dari kebijakan pemerintah yang menekan pertumbuhan ekonomi terhadap daerah yang menjadi pusat pertumbuhan saja, hal ini berdampak pada ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu perlu adanya efek keterkaitan antar wilayah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Wilayah yang memiliki kemampuan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi dan memiliki jarak yang berdekatan secara spasial dengan wilayah yang lain akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah disekitarnya. Sejalan dengan pemikiran Capello, (2009) bahwa terciptanya potensi pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan perilaku-perilaku daerah tetangganya. Hal ini di sebabkan karena adanya interaksi antar wilayah (Fingleton & López-Bazo, 2006).

Interaksi wilayah menjadi penting karena berkaitan dengan pembangunan wilayah sesuai dengan *supply* dan *demand* wilayah tersebut. Kapasitas *supply* dalam hal ini bergantung pada kemampuan daerah untuk menyediakan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya kelembagaan. Sementara itu, kapasitas *demand* suatu daerah bergantung pada tingkat ketergantungan terhadap barang dan jasa yang bersumber dari luar wilayah. Potensi *supply* dan *demand* memiliki kebutuhan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya sehingga menimbulkan interaksi daerah berupa arus barang, manusia dan jasa. (Supriyatin *et al.*, 2020).

Salah satu sektor yang berpengaruh dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata. Menurut UU No. 10 tahun 2019

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin dan didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah sebagai kebutuhan setiap orang. Sektor pariwisata dalam hal ini juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri.

Madura, sebuah pulau di sebelah timur Jawa, memiliki potensi pariwisata yang menarik dan unik berkat kekayaan budaya, keindahan alam, dan warisan sejarahnya. Pulau Madura memiliki 98 objek wisata yang dapat di jadikan sumber pendapatan daerah, 38 objek wisata diantaranya terdapat di Kabupaten Sumenep, 23 objek wisata di Kabupaten Pamekasan, 12 objek wisata di Kabupaten Sampang, dan 25 objek wisata berada di Kabupaten Bangkalan. Wisata Madura banyak menawarkan sejumlah objek dengan daya tarik tersendiri. Namun, pengembangan pariwisata di Madura masih belum sepenuhnya optimal, dan kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian tentang pariwisata di Madura sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di pulau ini.

Tempat wisata tentunya tidak akan terlepas dari wisatawan. Wisatawan merupakan pelaku dari kegiatan wisata. Wisatawanlah yang akan membawa uang dari tempat mereka berasal dan menghabiskannya di daerah tujuan wisata. Jumlah wisata sangat berpengaruh pada pendapatan dari tempat wisata itu sendiri, tanpa adanya wisatawan, maka kegiatan wisata tidak akan pernah ada dan sektor pariwisata tidak dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah bahkan bagi negara. Berikut tabel data kunjungan wisatawan Madura tahun 2021.

Tabel 1. 1. Data kunjungan wisatawan Madura tahun 2021

Kabupaten	Winus	Wisman
Sumenep	248.158	-
Pamekasan	242.665	-
Sampang	133.997	2
Bangkalan	248.265	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sumenep 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan 2022, Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang 2022 dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan 2022

Berdasarkan data kunjungan wisatawan tahun 2021 Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Jumlah kunjungan wisata tertinggi adalah Kabupaten Bangkalan sebanyak 248.265 yang secara keseluruhan di dominasi oleh wisatawan domestik (Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan, 2021). Disusul oleh jumlah wisatawan Kabupaten Sumenep yaitu sebanyak 248.158 jiwa (Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sumenep, 2022) dan jumlah wisatawan Kabupaten Pamekasan 2021 adalah 242.665 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2022). Kabupaten Sampang tercatat jumlah wisatawan terendah sebesar 133.999 orang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 2 orang dan wisatawan nusantara sebesar 133.999 orang (Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang, 2021).

Jika dilihat dari jumlah kunjungan pariwisata di atas wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara masih terbilang sedikit bahkan tidak ada wisatawan manca negara. Potensi pariwisata harus sejalan dengan pengembangan daya saing wisata dan kelembagaan pada suatu wilayah. Kendala yang membuat wisatawan enggan untuk datang ke Madura disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, Dr.H.Jarianto.Msi dalam Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, (2012) yaitu kurangnya infrastruktur

yang memadai dan sinergitas pengembangan pariwisata antara Pemprov dan Pemkab/kota yang masih lemah.

Penelitian tentang pariwisata di Madura memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal. Pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan mempelajari tantangan dan peluang yang terkait dengan pengembangan pariwisata di Madura, dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk mengoptimalkan potensi pariwisata pulau ini.

Pariwisata dalam hal ini memiliki hubungan yang erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. PAD merupakan sumber pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi di daerah tersebut, termasuk sektor pariwisata.

Pertama, pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan langsung bagi daerah melalui berbagai bentuk pajak dan retribusi pariwisata. Ketika wisatawan mengunjungi suatu destinasi pariwisata, mereka biasanya dikenakan pajak seperti pajak penginapan, pajak restoran, atau pajak penjualan. Pajak-pajak ini akan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan berkontribusi pada PAD.

Kedua, pariwisata dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha lokal. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, permintaan terhadap produk dan jasa di daerah tersebut juga meningkat. Misalnya, para wisatawan akan membeli oleh-oleh atau kerajinan lokal, menggunakan jasa transportasi lokal, atau mengunjungi restoran dan warung makan setempat. Hal ini akan memberikan stimulus ekonomi pada sektor-sektor tersebut dan berdampak positif pada PAD.

Selain itu, pariwisata juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dengan adanya sektor pariwisata yang berkembang, akan tercipta peluang kerja bagi masyarakat di bidang pemandu wisata, staf hotel, pengelola restoran, pengusaha jasa transportasi, dan lain sebagainya. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan pada akhirnya meningkatkan PAD.

Dalam hal pengelolaan pariwisata, penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata secara berkelanjutan dan berdaya saing. Melalui pengembangan infrastruktur yang memadai, promosi pariwisata yang efektif, pengaturan pajak yang tepat, dan kerjasama dengan pelaku industri, daerah dapat meningkatkan potensi pendapatan dari sektor pariwisata dan berkontribusi pada PAD.

Berdasarkan tabel 1.2. Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD terbesar dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan yaitu sebesar 271.656.642.591,09 dengan Pendapatan Pajak Daerah sebesar 48.377.072.078,00, Retribusi Daerah sebesar 13.359.256.495,70, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2.763.879.429,15 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 2.763.879.429,15. Sedangkan PAD terendah yaitu Kabupaten Sampang sebesar 135.499.437.438,75 dengan pendapatan Pajak Daerah sebesar 30.998.519.687,00, Retribusi Daerah sebesar 20.899.641.935,00, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

sebesar 5.774.992.102,75 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 77.826.283.714,00.

Tabel 1. 2. PAD Kabupaten Setiap Kabupaten di Madura (Rp)

No	Jenis Pendapatan / Kind of Revenues	2021			
		Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	271.656.642.591,09	135.499.437.438,75	205.969.039.947,27	252.690.000.000,00
2	Pajak Daerah	48.377.072.078,00	30.998.519.687,00	38.503.953.058,00	38.700.000.000,00
3	Retribusi Daerah	13.359.256.495,70	20.899.641.935,00	10.053.688.754,00	10.090.000.000,00
4	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.763.879.429,15	5.774.992.102,75	2.080.932.532,80	16.550.000.000,00
5	Lain-lain PAD yang Sah	207.156.434.588,24	77.826.283.714,00	155.330.465.602,47	187.350.000.000,00

Sumber : BAPPENDA Bangkalan, BPPKAD Sampang, BAPPENDA

Pamekasan, BPPKA Sumenep 2022

Jika dilihat dari tabel diatas pendapatan yang dihasilkan oleh pajak dan retribusi daerah lebih rendah daripada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jumlah pajak daerah kabupaten Bangkalan sebesar 48.377.072.078,00, Kabupaten Sampang 30.998.519.687,00, Kabupaten Pamekasan 38.503.953.058,00 Dan Kabupaten Sumenep 38.700.000.000,00. Jumlah retribusi daerah kabupaten Bangkalan sebesar 13.359.256.495,70, Kabupaten Sampang 20.899.641.935,00 , Kabupaten Pamekasan 10.053.688.754,00 dan Kabupaten Sumenep sebesar 10.090.000.000,00. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah kabupaten Bangkalan sebesar 207.156.434.588,24, Kabupaten Sampang 77.826.283.714,00, Kabupaten Pamekasan 155.330.465.602,47 dan Kabupaten Sumenep 187.350.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di

Madura belum menjadi sektor yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah maka dari itu perlu dilihat apakah adanya keterkaitan dan interaksi wisata antar daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemilihan sektor pariwisata di Madura untuk di teliti disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu :

1. Tantangan pengembangan pariwisata:

Meskipun memiliki potensi yang besar, pariwisata di Madura masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, pemasaran, pelatihan, dan pengelolaan destinasi dan kelembagaan. Penelitian tentang pariwisata dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor ini dan memberikan solusi yang tepat untuk mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan dan berdaya saing.

Infrastruktur yang kurang memadai dalam hal ini seperti aksesibilitas yaitu transportasi wisatawan ke tempat wisata belum efisien dan terintegrasi, kurangnya jumlah kualitas dan kuantitas akomodasi saat berwisata seperti hotel dan penginapan. Serta, Infrastruktur pendukung pariwisata seperti toilet umum, tempat parkir, tempat makan, dan pusat informasi wisata yang belum memadai.

Selain infrastruktur yang kurang memadai jika dilihat dari sisi kelembagaan banyak objek wisata di Madura merupakan hak milik pribadi/perorangan. Kasus yang terjadi di Pantai Wisata Lombang Madura menunjukkan adanya permasalahan kelembagaan pariwisata, dimana terjadi perebutan sengketa lahan antara ahli waris pemilik wisata dan juga pemerintahan setempat karena ahli waris tidak mendapat retribusi pengunjung dari pemerintah. Akhirnya pemerintah menyerahkan kasus tersebut kepada Mahkamah Agung terkait putusan kasasi

soal sengketa kepemilikan lahan antara warga dan pemerintah (Tempo Nasional, 2010).

Permasalahan pariwisata yang muncul dapat berdampak terhadap perkembangan pariwisata setempat yang mana pariwisata seharusnya berkelanjutan dan dijadikan mata pencaharian masyarakat setempat akan tetapi malah terhambat oleh permasalahan yang ada. Indra *et al.*, (2020) menjelaskan pengembangan faktor penarik di sektor pariwisata, kelembagaan memiliki peran kunci untuk menentukan keberhasilan objek wisata. Jika pengelolaan objek wisata dapat diperbaiki maka hal tersebut akan berdampak terhadap nilai ekonomi wisata yang dihasilkan objek wisata tersebut. Fauzi (2010) menjelaskan bahwa setiap objek wisata memiliki nilai ekonomi yang dihasilkan dari segala aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Valuasi ekonomi (nilai ekonomi) merupakan pengukuran jumlah maksimum seseorang dalam mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Konsep ini disebut sebagai keinginan membayar (*willingness to pay/WTP*) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan

2. Keterbatasan penelitian sebelumnya:

Jika sudah ada banyak penelitian tentang sektor pertanian di Madura, maka penelitian tentang pariwisata dapat memberikan sumbangan baru dalam pemahaman dan pengembangan sektor pariwisata di pulau ini.

Penelitian sebelumnya menjelaskan terkait spillover effect antar wilayah, Qibti & Hendarto, (2020) dan Umiyati, (2014) melihat efek limpahan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah Purwomanggung dan menganalisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antarwilayah

di Pulau Sumatera, kedua analisis ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melihat efek limpahan ekonomi secara keseluruhan antar wilayah. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut kebanyakan peneliti hanya melihat efek limpahan ekonomi secara umum namun masih sedikit penelitian yang melihat efek limpahan ekonomi secara khusus seperti efek limpahan ekonomi pariwisata antar daerah. Adapun beberapa penelitian tentang efek limpahan ekonomi pariwisata antar wilayah, Yang & Fik, (2014) yang mengidentifikasi beberapa faktor ekonomi pariwisata lokal seperti pertumbuhan ekonomi, ekonomi lokalisasi, anugerah sumber daya pariwisata, dan infrastruktur hotel dan Rahmad Igarta & Handayani, (2020) yang menganalisis autokorelasi spasial dari sektor PDRB pariwisata daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya banyak yang membahas keterkaitan pdrb antar wilayah sedangkan keterkaitan pariwisata antar wilayah masih banyak yang belum membahasnya. Selain itu variabel yang digunakan peneliti berbeda dengan variabel penelitian sebelumnya dalam penelitian ini penulis ingin melihat *spillover effect* pariwisata melalui variabel PAD, Kunjungan wisatawan, daya saing wisata (atraksi, amenities dan aksesibilitas), nilai ekonomi wisata dan kelembagaan.

Dr. Ir. Arief Yahya, M. Menteri Pariwisata Indonesia tahun 2014-2019 menyampaikan dalam pidatonya terkait mengapa suatu wilayah harus mengembangkan sektor pariwisatanya terlebih dahulu. Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ketika suatu wilayah dikembangkan sebagai destinasi pariwisata, wisatawan dari berbagai daerah dan negara akan datang untuk mengunjungi. Hal ini akan menghasilkan aliran uang baru ke wilayah tersebut, menggerakkan sektor usaha lokal, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pariwisata juga

mendorong kegiatan perdagangan, kerajinan, kuliner, dan jasa lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan pariwisata juga dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi wilayah yang mengandalkan sektor ekonomi lain yang tidak stabil. Banyak wilayah yang mengalami kerentanan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, atau kondisi pasar yang tidak menentu. Dalam situasi seperti ini, pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Keterkaitan antarwilayah dalam hal ini sangat penting untuk diteliti. Keterkaitan pariwisata dapat membantu percepatan pembangunan ekonomi sektor pariwisata antar daerah. *Spillover effect* atau efek limpahan dinamika pariwisata yang mengacu pada efek tidak langsung yang diberikan oleh kegiatan pariwisata suatu daerah, dapat memberikan keuntungan terhadap pertumbuhan pariwisata daerah sekitarnya (Yang & Fik, 2014). Studi (Optari, 2021) adanya *spillover effect* Kabupaten Asahan menimbulkan *spread effect* bagi *hinterland*. Sementara (Prihantono *et al.*, 2022) dalam penelitiannya Kabupaten Gresik yang tidak berbatasan langsung dengan wilayah Surabaya dan Sidoarjo terbukti memiliki *backwash effect* yang lebih besar dan menyebabkan ketimpangan antar wilayah. Suatu daerah dapat memberikan *spread effect* maupun *backwash effect* dari pusat pertumbuhan sektor pariwisata di daerah sekitarnya.

Dampak *spillover effect* pada wilayah *hinterland* ditentukan oleh kemampuan pusat pertumbuhan memberikan pengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Kontribusi sektor ekonomi merupakan penggerak utama pusat pertumbuhan. Sektor ekonomi pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini sektor

pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi wisata dan dianggap penting bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Harapan pemerintah terhadap sektor ini dapat menjadi tumpuan ekonomi Indonesia yang pada akhirnya menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Hal ini terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 dengan 7 Agenda pembangunan yang tertuang di dalamnya. Salah satu agenda tersebut menyebutkan bahwa dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing salah satunya melalui akselerasi peningkatan nilai tambah pariwisata (Kementrian PPN/Bappenas, 2020).

Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan akan ditemukan rekomendasi dan solusi konkret untuk mengembangkan sektor pariwisata di Madura secara berkelanjutan dan kompetitif. Upaya ini akan mendukung pertumbuhan pariwisata di pulau ini, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat identitas budaya dan warisan sejarah Madura.

Berdasarkan permasalahan yang ada konsep pembangunan pada pusat pertumbuhan pariwisata di Madura seharusnya dapat memberikan *spillover effect* yang positif terhadap daerah disekitarnya, sehingga terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui bagaimana efek limpahan (*Spillover effect*) pusat pertumbuhan pariwisata terhadap perkembangan perekonomian pariwisata di daerah sekitarnya (R. Wibowo et al., 2013).

Penulis tertarik untuk menguji adanya keterkaitan spasial pada sektor pariwisata antar kabupaten yang ada di Madura dengan menggunakan Variabel Pendapatan asli daerah, Variabel Jumlah Kunjungan Wisata, Variabel Nilai Ekonomi, Daya Saing Wisata (Atraksi, Akseibilitas dan Amenitas) serta Variabel Kelembagaan (Modal Manusia, Modal Alam, Modal Fisik, Modal Finansial dan Modal Sosial).

1.2. Rumusan Masalah

Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan yang mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan memberikan *mutliplier effect* terhadap sektor pendukung lainnya. Madura memiliki daya tarik alam dan budaya yang mampu menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Penelitian ini mencoba melihat apakah Variabel - Variabel yang ada dapat memberikan efek limpahan (*spillover effect*) antar wilayahnya menggunakan pendekatan ekonometrika spasial. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat *spillover effect* (efek limpahan) Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar wilayah di Madura?
2. Bagaimana hubungan keterkaitan spasial variabel kunjungan wisatawan antar wilayah di Madura?
3. Bagaimana hubungan keterkaitan spasial variabel nilai ekonomi antar wilayah di Madura?
4. Bagaimana hubungan keterkaitan spasial variabel daya saing wisata (Atraksi, Amenitas, Akseibilitas) antar wilayah di Madura?
5. Bagaimana hubungan keterkaitan spasial variabel kelembagaan antar wilayah di Madura?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis adanya *spillover effect* (efek limpahan) Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar wilayah di Madura.
2. Untuk menganalisis adanya hubungan keterkaitan spasial variabel jumlah kunjungan wisata antar wilayah di Madura.
3. Untuk menganalisis adanya hubungan keterkaitan spasial variabel nilai ekonomi antar wilayah di Madura.
4. Untuk menganalisis adanya hubungan keterkaitan spasial daya saing wisata (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas) antar wilayah di Madura.
5. Untuk menganalisis adanya hubungan keterkaitan spasial variabel kelembagaan antar wilayah di Madura.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dan Empiris
 - a. Menjadi referensi baru dalam pengujian adanya efek limpahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Kunjungan Wisata, Nilai Ekonomi Pariwisata, Daya Saing Wisata dan Kelembagaan suatu wilayah terhadap wilayah lainnya.
 - b. Sebagai tambahan referensi pembelajaran di bidang ilmu ekonomi terutama dalam bidang Regional.
2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam membangun sektor pariwisata khususnya di Madura guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya.
- b. Menjadi referensi dalam menjelaskan pertanyaan terhadap para pelaku ekonomi praktis terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Kunjungan Wisata, Nilai Ekonomi Pariwisata, Daya Saing Wisata dan Kelembagaan dalam memberikan efek limpahan pertumbuhan ekonomi wilayah Madura.